

Peran Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Semangat Demokrasi Generasi Muda di Kabupaten Belitung Timur

Abby Alfianda^{a, 1*}

^a Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹ abby.alfianda@upi.edu*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 20 Agustus 2023;

Revised: 28 Agustus 2023;

Accepted: 10 September 2023.

Kata-kata kunci:

Pendidikan Politik;

Semangat Demokrasi;

Generasi Muda.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pendidikan politik dan implementasi dari pendidikan politik bagi generasi muda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur dengan desain penelitian deskriptif kualitatif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, tape-recorder, dan catatan lapangan. Adapun partisipan dalam penelitian ini adalah Pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur, Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur, dan Kepala Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik dan Fasilitasi Pemilihan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur. Pelaksanaan pendidikan politik sebetulnya sudah dilaksanakan setiap satu tahun yang melibatkan berbagi elemen masyarakat dan generasi muda. Namun realitanya, pendidikan politik yang dilaksanakan belum dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan semangat demokrasi generasi muda di Kabupaten Belitung Timur.

ABSTRACT

The Role of Political Education in Increasing the Democratic Spirit of the young generation in East Belitung District. The purpose of this research is to know the mechanism of political education and the implementation of political education for the younger generation. The method used in this study is semi-structured interviews with qualitative descriptive research designs. The instruments used in this study are interview guidelines, tape recorders, and field records. The candidates in this study are the Head of The National Unity and Political Agency of East Belitung Regency, Head of Ideology and National Insight Development of The National Unity and Political Agency of East Belitung Regency, Head of Domestic Politics of The National Unity and Political Agency of East Belitung Regency, and Head of Sub-Division of Political Culture Education and Facilitation of Election of The National Unity and Political Agency of East Belitung Regency. The implementation of political education has actually been carried out every year which involves sharing elements of society and the younger generation. But the reality is, political education implemented has not been able to influence the increasing democratic spirit of the younger generation in East Belitung Regency.

Keywords:

Law Awareness Society;

Indonesia Government.

Copyright © 2023 (Abby Alfianda). All Right Reserved

How to Cite : Alfianda, A. (2023). Peran Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Semangat Demokrasi Generasi Muda di Kabupaten Belitung Timur. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(9), 325–332. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i9.2049>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Permasalahan politik di Indonesia sekarang ini sering mengalami pasang surut. Pasca reformasi, semangat demokrasi generasi muda dalam ranah politik mengalami gejala kelesuan yang diindikasikan pada penurunan kualitas dan kuantitas politik. Kita ambil contoh dalam pelaksanaan pemilihan umum misalnya. Di beberapa daerah di Indonesia tingkat golongan putih (golput) yang di akibat oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja partai politik maupun figur yang dicalonkan. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sering juga dinodai oleh penggunaan politik uang (money politics) dalam mempengaruhi proses pemilihan seorang calon.

Lingkungan belajar yang efektif akan mengembangkan suasana yang baik, tenang, dan nyaman, dan pendidikan akan mempengaruhi perkembangan nilai-nilai materi, estetika, dan keterlibatan otentik yang terbentuk secara alami oleh lingkungan (Anggraeni et al., 2022). Melihat fenomena tersebut, perlu adanya tindakan serius dari pihak pemerintah dalam menangani rendahnya semangat demokrasi di kalangan masyarakat terutama generasi muda. Saat ini, pemerintah telah menyelenggarakan pendidikan politik kepada generasi muda melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Pendidikan politik merupakan suatu upaya pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan politik masyarakat agar nantinya mereka dapat berpartisipasi secara maksimal di dalam penyelenggaraan sistem politik dan paham akan kedaulatan rakyat atau demokrasi itu sendiri.

Dalam meningkatkan semangat demokrasi generasi muda tentunya tidak semudah yang dibayangkan. Hal tersebut dikarenakan generasi muda saat ini cenderung cuek, acuh, dan tidak peduli terhadap proses politik atau perkembangan demokrasi di negara ini. Peran pemerintah juga dirasa masih kurang di dalam meningkatkan semangat demokrasi pada generasi muda. Faktor tersebut menjadi permasalahan yang cukup serius dan harus segera ditangani. Mengingat masih rendahnya semangat demokrasi serta kesadaran generasi muda terhadap haknya sebagai warga negara. Generasi muda saat ini hanya cenderung aktif dalam perkembangan politik dalam negeri namun kepedulian terhadap perkembangan politik itu hanya sebatas di media sosial saja dan tidak disertai dengan sebuah tindakan. Hal tersebut membuktikan bahwa semangat generasi muda saat ini hanya berada di permukaan saja, belum ada semangat yang besar untuk terlibat dalam pelaksanaan demokrasi di negeri ini.

Penanaman nilai-nilai luhur kepada generasi muda menjadi suatu keniscayaan, mengingat posisi dan fungsi generasi muda yang begitu vital dalam mencapai cita-cita dan harapan bangsa. Apalagi saat ini Indonesia sedang bersiap menghadapi bonus demografi dengan jumlah penduduk yang besar tergolong masih muda (Anggraeni et al., 2021). Pendidikan Politik yang diselenggarakan oleh Bakesbangpol merupakan sarana dalam membentuk karakter kepemimpinan dan semangat demokrasi dalam politik pada generasi muda. Bila kita melihat potensi yang dimiliki oleh generasi muda, tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan politik ini sangat penting untuk dilaksanakan dan disampaikan sejak dini serta dipahami oleh masyarakat Indonesia terutama generasi muda agar nantinya rakyat Indonesia tidak menjadi objek politik saja namun berperan sebagai subjek politik. Dengan dilaksanakannya pendidikan politik ini, diharapkan generasi muda menjadi “melek politik” dan rakyat akan sadar akan hak dan kewajibannya, kritis, sadar hukum, aktif, dan kreatif serta konstruktif.

Berdasarkan atas permasalahan generasi muda dalam rendahnya semangat demokrasi, pemerintah harus bekerja sama dengan dinas terkait atau swasta dalam mensukseskan pelaksanaan pendidikan politik sehingga dapat meningkatkan semangat demokrasi generasi muda. Bakesbangpol memaparkan bahwa pendidikan politik ini dilaksanakan dengan tujuan agar dapat memberikan pembelajaran kepada generasi muda, memberikan motivasi serta pemahaman akan pentingnya peran generasi muda dalam proses politik di negaranya. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yakni kurangnya minat generasi muda dalam mengikuti kegiatan tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah harus terus berupaya mendukung kegiatan pendidikan politik agar terus berjalan guna meningkatkan semangat demokrasi generasi muda. Pendidikan politik bagi generasi muda juga diatur

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2010 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.

Menurut George Edward III (1980) yang berpandangan Top Down, beliau menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah masalah yang krusial bagi public administration dan public policy. Dia menegaskan bahwa tanpa adanya implementasi yang efektif dari pembuat kebijakan, maka kebijakan itu tidak bisa berjalan dengan sukses. Implementasi kebijakan publik biasanya tidak berjalan dengan sukses dikarenakan kurangnya koordinasi dan kerjasama diantara lembaga-lembaga dalam pemerintahan maupun koordinasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Pada dasarnya tujuan dan sasaran kebijakan harus terlebih dahulu diinformasikan melalui komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan target atau kelompok Sasaran sehingga nantinya jika kelompok sasaran sudah memahami kebijakan yang akan dilakukan pemerintah, efektifitas dari implementasi diperkirakan akan menjadi lebih baik. Dari penjelasan diatas kita dapat menyimpulkan bahwasanya implementasi kebijakan pendidikan politik merupakan masalah yang krusial pada kebijakan publik yang dimana implementasi kebijakan tersebut merupakan tahap pelaksanaan dari suatu kebijakan yang menentukan keberhasilan dari kebijakan publik itu sendiri. Keberhasilan suatu kebijakan tersebut dapat dilihat dari berhasil tidaknya implementasi, tetapi dalam hal ini, implementasi kebijakan tidak hanya bisa dipandang dari bagaimana perumusan yang baik tetapi tentang bagaimana pelaksanaannya, dimana setiap jajaran harus terlibat dalam suatu kebijakan dan saling berkoordinasi satu sama lain agar implementasi menjadi lebih baik (Anggraeni et al., 2020).

Betapa pentingnya sebuah implementasi kebijakan pendidikan politik untuk semua warganegara Indonesia, seperti halnya implementasi Pendidikan secara umum mencakup Pendidikan yang betapa pentingnya diimplementasikan melalui bidang lain seperti bidang olahraga yang sangat erat kaitannya dengan Pendidikan politik dimasa kini (Paramitha et al., 2022a)Maka menjadi harapan kita semua agar pendidikan politik ini dapat diterapkan di negara Indonesia yang bersumber pada aspirasi yang digali dari kepribadian dan kekayaan spiritual bangsa sendiri, dan telah disepakati secara nasional demi tegaknya Republik Indonesia. Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, diharapkan nantinya pemerintah harus bisa mengimplementasikan segala kebijakan dari pendidikan politik ini dengan menyaring dan menilai ulang segala kebijakan pendidikan politik, serta pemerintah harus dapat menolak semua ideologi dan nilai-nilai asing yang sebetulnya tidak sesuai dengan aspirasi dan kepribadian bangsa kita. Affandi (1996:27) menyatakan bahwa pendidikan politik dianggap penting oleh hampir semua masyarakat dan dianggap sebagai penentu perilaku politik seseorang. Dari pernyataan tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pendidikan politik sebagai alat untuk mempertahankan sikap dan norma politik dan meneruskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik melalui akulturasi informal maupun melalui pendidikan politik yang direncanakan untuk menunjang stabilitas sistem politik. Brownhill dan Smart (1989), juga berpendapat bahwa pendidikan politik adalah proses pendidikan untuk membina siswa agar mampu memahami, menilai, dan mengambil keputusan tentang berbagai permasalahan dengan cara-cara yang tepat dan rasional, termasuk dalam menghadapi masalah yang bias maupun isu yang kontroversial. Adanya pendidikan politik ini diharapkan, kita mampu menanggulangi segala ancaman dan serbuan kekuatan atau pengaruh-pengaruh dari negara luar sehingga bisa tergalang penalaran sehat mengenai bela negara dan nasionalisme yang sehat dan semangat demokrasi yang tinggi dalam politik.

Beberapa penelitian menyatakan bahwa Pemerintah harus membuat begitu banyak kebijakan dan amandemen untuk meningkatkan standar pendidikan. Pemerintah harus begitu ketat dalam menerapkan kebijakan dan amandemen baru (Borah 2012). Penelitian ini berfokus pada pemerintah india yang membuat berbagai kebijakan pendidikan dan amandemen di dalam negaranya (Paramitha et al., 2022b). Sementara penelitian lain menyatakan bahwa penerapan analisis penyelesaian politik dapat membantu menjelaskan pola kemajuan dalam akses dan kualitas pendidikan, dan untuk mengidentifikasi insentif

politik yang mendasarinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola kemajuan dan kualitas pendidikan terhadap aspek politik yang mendasarinya. (Wales, dkk. 2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah jenis penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur dengan desain penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, akan mendeskripsikan atau menjelaskan pelaksanaan pendidikan politik dalam meningkatkan semangat demokrasi generasi muda yang dikaitkan dengan penelitian dari (T5) dimasa pandemic Covid-19 (Paramitha, Hasan, Ilsa, et al., 2021)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan pendidikan politik pada generasi muda dan untuk mengetahui implementasi dari pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda agar dapat memiliki semangat untuk berpartisipasi aktif dalam segala proses kegiatan demokrasi di negaranya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui persoalan-persoalan apa saja yang terdapat dalam pelaksanaan program pendidikan politik dalam meningkatkan semangat demokrasi. Karena pada dasarnya, Pendidikan politik mensyaratkan mengandung unsur-unsur bernuansa moral. Misalnya ketaatan terhadap hukum atau aturan main, mengagungkan kepentingan publik, memproses kebijakan secara prosedural, pro rakyat banyak, penuh keteladanan, pencerahan publik, dan mengusung visi serta program yang populis. Pendidikan politik memiliki muatan politis, meliputi loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik.

Dalam proses demokrasi sekarang, pendidikan politik sangat diperlukan karena adanya tuntutan-tuntutan demokrasi itu sendiri. Karena demokrasi sering memunculkan banyak ketidakstabilan, namun demokrasi juga memberikan kemungkinan-kemungkinan baru serta harapan baru yang menyenangkan dalam dunia politik di Indonesia. Karena sejatinya, pendidikan politik ini tidak hanya ditujukan kepada perubahan sikap-sikap politik perorangan saja, akan tetapi juga untuk mendukung usaha-usaha dalam memperbaharui dan mendinamisir institusi-institusi kemasyarakatan dan lembaga-lembaga politik. Bangsa kita memilih bentuk demokrasi sebagai wujud pemerintahan dan sebagai asas dasar bagi penataan pemerintahan, karena demokrasi diharapkan dapat memberikan jaminan berupa kebebasan manusia untuk mempertanggungjawabkan kehidupannya sendiri.

Politik adalah usaha-usaha yang ditempuh warganegara untuk membicarakan dan mewujudkan sebuah kebaikan bersama. Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles dalam bukunya *Ramalan Surbakti* (1992-2) dia melihat politik sebagai suatu asosiasi warganegara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal ikhwal yang menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat. Aktivitas yang menyangkut kebaikan bersama memiliki nilai moral yang lebih tinggi dari pada aktivitas urusan yang menyangkut kepentingan swasta. Dalam pengertian politik tersebut mengandung tujuan dan etik masyarakat yang sangat jelas. Berpolitik disini ialah membicarakan dan merumuskan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan ikut serta dalam upaya mengejar tujuan bersama.

Menurut Thomas P. Jenkin dalam *The Study of Political Theory*, teori politik dibedakan menjadi dua macam, yaitu: *Valuational*, yang merupakan teori-teori yang mengandung nilai moral dan norma politik, di mana dalam teori ini segalanya harus dipertimbangkan secara baik buruk atau kosekuensinya dan *Non-Valuational*, yang merupakan teori-teori yang membahas fakta-fakta politik tanpa mempersoalkan nilai moral maupun norma. Teori ini memberikan gambaran dan perbandingan fenomena politik dalam kehidupan nyata.

David Easton melihat kehidupan politik sebagai satu sistem tingkah laku yang beroperasi di dalam dan mereaksi terhadap lingkungan sosialnya, seraya menyajikan alokasi nilai-nilai yang mengikat (Kartini Kartono, 1996). Dalam sistem politik unsur yang paling penting adalah pembagian nilai-nilai terutama nilai kesejahteraan, keadilan dan keamanan bagi setiap warganegara. Dengan begitu politik sangat erat kaitannya dengan pengambilan kebijakan pemerintah, yang secara normatif harus bersih dan adil. K.W Deuttsch juga berpendapat mengenai politik (Kartono, 1996) dia mengatakan

bahwa politik dan pemerintah itu pada esensinya tampil sebagai proses-proses pengendalian dan pengordinasian usaha-usaha insani dalam mencapai beberapa perangkat tujuan. Satu kelompok akan muncul apabila berlangsung relasi-relasi yang berulang-ulang atau terus-menerus diantara individu dengan individu lain, kemudian diorganisir cukup baik untuk mendorong terjadinya aktivitas-aktivitas yang memiliki tujuan, khususnya tujuan-tujuan politik.

Demokrasi merupakan sesuatu yang penting bagi institusi pemerintah, dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan umum yang bebas. Kriteria yang membedakan gagasan demokrasi adalah sikap terhadap manusia. Sikap dasar ini yang diungkapkan oleh Abraham Lincoln sebagai berikut: Karena aku tidak ingin menjadi budak dan aku tidak ingin menjadi tuan. Demikianlah demokrasi menurutnya, apapun yang berbeda dari gagasan itu sampai pada tingkat yang ekstrem, bukanlah demokrasi. (Ketchum, 2004).

Masyarakat menciptakan demokrasi, sejatinya demokrasi merupakan hasil dari rekayasa yang mereka ciptakan sendiri. Untuk memahami hakekat demokrasi kita harus mengujinya sebagaimana yang ditampilkan di beberapa belahan dunia. Demokrasi tampak pada masyarakat yang menciptakannya pada prinsip-prinsip hidup yang mereka miliki, karena pada dasarnya, demokrasi merupakan sebuah produk yang dihasilkan langsung dari seluruh warganya. Tidak ada satupun masyarakat demokrasi yang mencapai kesempurnaan tanpa mengubah cita-citanya menjadi sebuah kenyataan. Demokrasi dapat menyerap pemikiran dan perilaku seluruh lapisan masyarakat. Demokrasi sebenarnya dapat membahayakan, tetapi sebagian lagi bermanfaat, dan terkadang menyakitkan, dari pengalaman inilah orang belajar dari kesalahan dan keberhasilan yang pada gilirannya menjadi masyarakat yang kaya dan penuh makna.

Demokrasi sudah menjadi sebuah paradigma dalam bahasa komunikasi dunia yang berkaitan dengan suatu sistem pemerintahan dan sistem politik yang dianggap ideal. Oleh sebab itu, menurut Ni^{matul} Huda, tidak dapat dibantah bahwa demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Di zaman modern sekarang ini, hampir semua negara mengklaim menjadi penganut paham demokrasi. Seperti dapat diketahui dari penelitian Amos J. Peaslee, pada tahun 1950, dari 83 Undang-Undang Dasar negara-negara yang diperbandingkannya, terdapat 74 negara yang konstitusinya secara resmi menganut prinsip kedaulatan rakyat.

Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yakni: menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*); menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*); menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rulers*); membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*); mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku dan Menjamin tegaknya keadilan.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah wawancara semi-terstruktur, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pendidikan politik pada generasi muda. Desain penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk menggali makna dari permasalahan sosial yang berkaitan dengan pendidikan politik. Instrumen yang digunakan meliputi pedoman wawancara, tape recorder, dan catatan lapangan. Proses penelitian melibatkan langkah-langkah penting seperti menentukan topik kajian, pengembangan instrumen, pengumpulan data melalui wawancara, identifikasi sumber data, penyajian data, dan analisis data. Narasumber terdiri dari empat orang yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur.

Hasil dan Pembahasan

Hasil wawancara dengan pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) mengungkapkan bahwa mekanisme pelaksanaan program pendidikan politik dilakukan melalui standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982. Ada tiga mekanisme utama yang ditekankan: pertama, pengetahuan politik yang melibatkan kesadaran politik; kedua, sikap (afektif); dan ketiga, perilaku atau tindakan. Tahapan-tahapan dalam pendidikan politik ini termasuk memberikan fasilitas pendidikan politik kepada generasi muda, sosialisasi bantuan politik, penggunaan website dan media sosial, serta sosialisasi pemilihan umum.

Menurut Paramitha, Hasan, Anggraeni, dkk. (2021), tahapan tersebut meliputi pemberian fasilitas pendidikan politik kepada generasi muda untuk meningkatkan kesadaran politik mereka. Selain itu, sosialisasi bantuan politik juga dilakukan oleh partai politik dengan alokasi dana yang signifikan untuk pendidikan politik. Dalam era teknologi dan informasi saat ini, pemanfaatan media sosial menjadi penting dalam menyampaikan informasi pendidikan politik kepada generasi muda, sehingga memfasilitasi pelaksanaan pendidikan politik dengan lebih efektif.

Selain itu, kolaborasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Komisi Pemilihan Umum dalam sosialisasi pemilihan umum bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang proses pemilihan kepala daerah dan pentingnya partisipasi dalam demokrasi. Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan politik dapat berjalan lancar, sesuai dengan tujuan pembuat kebijakan dan teori George Edward III (1980) yang menekankan pentingnya implementasi yang efektif untuk kesuksesan kebijakan.

Implementasi program pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) memiliki peran penting dalam meningkatkan semangat demokrasi generasi muda. Menurut Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Bakesbangpol, implementasi ini merupakan tahap penting dalam mencapai tujuan kebijakan pendidikan politik, yang dapat menentukan kesuksesan kebijakan tersebut dalam menghasilkan output dan outcomes yang telah direncanakan. Implementasi diarahkan untuk membentuk kepribadian politik, meningkatkan kesadaran politik, dan mendorong partisipasi politik generasi muda.

Dalam implementasi program pendidikan politik, pentingnya disposisi atau sikap pelaksana menjadi faktor krusial, sebagaimana teori Edwards yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh karakteristik pelaksana. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa implementasi program pendidikan politik di Kabupaten Belitung Timur tidak selalu mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan pentingnya komitmen dan kejujuran pelaksana kebijakan dalam menjalankan program pendidikan politik. Kesuksesan implementasi juga sangat tergantung pada penerima kebijakan, yaitu generasi muda, yang harus memiliki kesadaran politik dan semangat demokrasi yang tinggi.

Dalam konteks ini, pendidikan politik bukan hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga merupakan sarana pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai demokrasi sejak dini. Oleh karena itu, implementasi program pendidikan politik harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam meningkatkan semangat demokrasi generasi muda dan kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaan program pendidikan politik, terdapat beberapa persoalan yang masih menghambat proses dan berpotensi mempengaruhi semangat demokrasi generasi muda. Menurut Kepala Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik dan Fasilitasi Pemilihan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, persoalan-persoalan tersebut meliputi kurangnya semangat generasi muda serta peran pemerintah yang dinilai masih kurang optimal.

Pertama, kurangnya semangat generasi muda dalam berpartisipasi dalam politik dan demokrasi menjadi persoalan utama. Generasi muda cenderung apatis dan tidak peduli terhadap perkembangan politik di Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain rasa takut untuk bergabung

atau berpartisipasi dalam partai politik, tekanan dari orang tua yang melarang keterlibatan politik, serta kurangnya pemahaman akan politik dan demokrasi. Kekhawatiran akan korupsi dan kurangnya pengetahuan politik menyebabkan semangat demokrasi menurun di kalangan generasi muda.

Kedua, kurangnya peran pemerintah dalam mensukseskan program pendidikan politik juga menjadi persoalan yang signifikan. Meskipun pemerintah bertanggung jawab dalam membuat dan melaksanakan program pendidikan politik, minimnya fasilitas yang diberikan dan kurangnya keterlibatan pemerintah dalam pendampingan program tersebut mengakibatkan pendidikan politik dirasakan kurang optimal. Kerjasama antara instansi pemerintah dan instansi pendidikan juga belum terjalin dengan baik, padahal instansi pendidikan dianggap sebagai wadah yang potensial untuk meningkatkan semangat demokrasi generasi muda.

Untuk mengatasi persoalan-persoalan ini, diperlukan langkah-langkah konkret seperti meningkatkan pemahaman politik dan demokrasi melalui pendidikan formal dan non-formal, memberikan dukungan yang lebih besar dari pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendidikan politik, serta memperkuat kerjasama antara pemerintah dan institusi pendidikan untuk meningkatkan semangat demokrasi generasi muda. Dengan demikian, diharapkan program pendidikan politik dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang positif dalam membangun kesadaran politik dan semangat demokrasi di kalangan generasi muda.

Simpulan

Berdasarkan analisis data pada bab sebelumnya, Pelaksanaan Program Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Semangat Demokrasi Generasi Muda di Kabupaten Belitung Timur menghadapi sejumlah kendala. Kurangnya peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendidikan politik menjadi salah satu faktor rendahnya semangat demokrasi generasi muda. Metode sosialisasi yang masih dominan dalam pelaksanaan program tersebut di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur terbukti tidak efektif, karena cenderung hanya menjangkau sebagian kecil masyarakat. Diperlukan inovasi dalam model sosialisasi yang menggabungkan teknologi modern agar informasi pendidikan politik dapat disampaikan secara merata kepada seluruh kalangan generasi muda. Kendala juga terjadi baik dari internal pemerintah maupun eksternal generasi muda. Pemerintah belum mampu memaksimalkan program pendidikan politik secara efektif, sementara generasi muda masih perlu meningkatkan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam proses demokrasi. Koordinasi antara pemerintah dan generasi muda menjadi kunci dalam mengatasi kendala tersebut, dengan pemerintah perlu turun langsung ke sekolah dan perguruan tinggi sebagai upaya meningkatkan efektivitas program pendidikan politik.

Referensi

- Affandi, F. N. (2018). *Pelaksanaan Program Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda (Studi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Anggraeni, L., Anggraeni, L., Affandi, I., Wahyudin, D., Paramitha, S. T., & Gilang, M. (2022). *Optimization of the Board Game as a Platform for the Concept of Peace Education : A Survey Method Study To cite this article : method study . International Journal of Education in Mathematics , Science , and Technology Optimization of the Board Game as a .*
- Anggraeni, L., Darmawan, C., & Tanszil, S. W. (2020). *The Use of Comic-Based Technology: Media Cultivation of Values in the Nation Defense. 418(Acec 2019), 428–431.* <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.081>
- Anggraeni, L., Darmawan, C., Tanszil, S. W., & Jubaedah, E. (2021). Promoting Ksatria Bela Negara comic through the Webtoon for the prevention and control Covid-19. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 18(1)*, 138–147. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.39377>
- Budiarjo, Miriam, 1981. *Partisipasi dan Partai Politik (Sebuah Bunga Rampai)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka

- Leo Agustino, 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Malihah, E., Nurbayani, S., & Anggraeni, L. (2020). Why is There Zero Women Candidate for Governor Election in West Java, Indonesia? *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 12(1), 1–11. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v12i1.21373>
- Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Paramitha, S. T., Hasan, M. F., Anggraeni, L., Noviyanti, M., Iلسya, F., Gilang Ramadhan, M., Maharani, A., & Kodrat, H. (2021). Analysis and evaluation of law number 12 of 2012 concerning higher education based on sports needs for students. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(2), 191–199. <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/42249>
- Paramitha, S. T., Hasan, M. F., Iلسya, M. N. F., Anggraeni, L., & Gilang Ramadhan, M. (2021). Level of physical activity of Indonesian esport athletes in the piala Presiden esport 2019. *Jurnal SPORTIF: Jurnal Penelitian Pembelajaran*, 7(1), 71–83. https://doi.org/10.29407/js_unpgri.v7i1.15642
- Paramitha, S. T., Komarudin, Fitri, M., Anggraeni, L., & Ramadhan, M. G. (2022a). Implementation of Healthy Gymnastics and Use of Technology as an Effort to Maintain Body Immunity during the Pandemic. *International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology*, 10(2), 328–340. <https://doi.org/10.46328/IJEMST.2290>
- Paramitha, S. T., Komarudin, Fitri, M., Anggraeni, L., & Ramadhan, M. G. (2022b). Rethinking the Relationship between Technology and Health through Online Physical Education during the Pandemic. *International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology*, 10(1), 132–144. <https://doi.org/10.46328/ijemst.2165>
- Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Kharisma, D. (2015). Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 1(7), 1144.
- Vidianditha, K. R. (2019). Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda Untuk Meningkatkan Partisipasi Terhadap Pemilihan Umum Dalam Membangun Demokrasi. In *Seminar Nasional Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(1), pp. 251-257).
- Pasaribu, P. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 5(1), 51-59.